

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pendayagunaan suatu hal dengan tujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik lagi kondisi kehidupannya. Dalam Undang-Undang mengenai Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 mengatakan pemberdayaan masyarakat desa merupakan cara dalam pengembangan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan kualitas baik dalam sikap, pengetahuan, perilaku, kemampuan, maupun keterampilan. Pada pelaksanaannya pemberdayaan terdapat tiga tahapan yang dilakukan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pemberdayaan masyarakat ini dapat menyangkut dua kelompok yang saling berhubungan yaitu masyarakat sebagai pelaku yang diberdayakan dan Lembaga swadaya masyarakat yang peduli dalam perubahan kehidupan sosial ekonominya.<sup>1</sup>

Selain tiga tahapan tersebut, pemberdayaan juga mempunyai 7 tahapan lainnya yaitu:

1. Persiapan, yaitu proses mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat seperti persiapan petugas atau orang yang memiliki kewenangan dalam memberdayakan, juga persiapan wadah yang berusaha dilakukan dengan arahan tak langsung.
2. Pengkajian, yakni dalam hal ini, petugas mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan, perkiraan solusi sementara, terlebih juga

---

<sup>1</sup> Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, 6, no. 1 (2020): 137-138

sumber daya dan kebutuhan yang diinginkan. Dimana dalam proses tersebut dapat dilakukan dengan cara berkelompok maupun individu.

3. Perencanaan alternatif program. Maksudnya adalah petugas melakukan perencanaan mengenai program yang pantas dijalankan dan cocok untuk mengentaskan persoalan tersebut. Petugas dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai agen perubahan yang berpartisipasi langsung melibatkan masyarakat untuk dapat berpikir mengenai persoalan permasalahan tersebut. Masyarakat diharapkan bisa memiliki beberapa alternatif program yang akan dijalankan.
4. Performalisasi rencana aksi. Maksudnya adalah petugas agen perubahan membantu kelompok dan merumuskan juga menetapkan program yang bisa dijalankan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, petugas juga dapat membantu dalam proses formalisasi ide kedalam tulisan, baik pembuatan proposal umum, maupun pembuatan proposal pengajuan dana kepada donatur.
5. Implementasi program. Dalam hal ini, petugas dan masyarakat yang berpartisipasi melaksanakan program yang telah terancang dan diharapkan masyarakat dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan program yang sudah dikembangkan. Masyarakat dan petugas harus saling bersinergi, sebab kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dengan rencana awal.
6. Evaluasi. Pada tahap evaluasi, petugas melakukan monitoring kepada masyarakat dan mengevaluasi seberapa berpengaruh program yang dijalankan. Selain itu, petugas juga melakukan perbaikan dalam kedepannya mengenai program yang dijalankan, apakah sudah cocok atau belum. Semua ini dapat berjalan dengan baik jika melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan

masyarakat akan bisa membentuk system komunitas dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Terminasi. Maksudnya adalah setelah program terserap dengan baik oleh komunitas masyarakat yang ditargetkan. Petugas melakukan pemutusan hubungan formal dengan komunitas masyarakat target dan proyek harus sudah segera dihentikan.<sup>2</sup>

Indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa baik program tersebut mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat yang dilayani. Indikator digunakan untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai dengan baik dan membantu dalam mengukur dampak nyata dari program. Berbagai elemen yang masuk ke dalam indikator adalah terdiri dari pengetahuan, partisipasi masyarakat, keterampilan, perubahan perilaku, akses ke layanan dan sumber daya, kualitas hidup, keberlanjutan program, partisipasi perempuan, efek ekonomi, kesejahteraan anak-anak, dan kemampuan kepemimpinan komunitas. Sangat penting untuk memilih indikator yang tepat karena mereka difungsikan untuk membantu mengukur secara objektif seberapa besar program pemberdayaan pada saat menghasilkan perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, indikator yang tepat dan dapat diukur memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kemajuan program sehingga seiring berjalannya waktu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam perbaikan juga pengembangan program pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

Berikut ini salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang biasanya digunakan pada program pemberdayaan masyarakat:

---

<sup>2</sup> Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat*, 2023. 15-16

1. Peningkatan Pengetahuan: Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan, termasuk tingkat literasi membaca dan menulis yang tinggi, adalah salah satu dari indikator indikator ini.
2. Partisipasi Masyarakat: Indikator ini menunjukkan seberapa aktif masyarakat terlibat dalam program dan pengambilan keputusan. Misalnya, jumlah orang yang menghadiri pertemuan komunitas.
3. Peningkatan Keterampilan: Indikator ini mengukur peningkatan keterampilan yang terkait dengan tujuan program, seperti kemampuan kerja dan kepemimpinan.
4. Perubahan Perilaku: Indikator ini menunjukkan perubahan dalam perilaku masyarakat yang baik, seperti mengubah pola makan, praktik kesehatan, atau perilaku lingkungan yang lebih berkelanjutan.
5. Peningkatan Akses: Indikator ini mengukur tingkat peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan penting, seperti layanan kesehatan dan air bersih.
6. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan peningkatan pendapatan, kualitas perumahan, dan kesejahteraan secara umum, indikator ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
7. Pengurangan Ketidaksetaraan: Sejauh mana program dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dinilai oleh indikator ini.
8. Peningkatan Keberlanjutan: Indikator ini mencakup upaya untuk mempertahankan manfaat program dalam jangka panjang. Hal ini bisa berarti keberlanjutan proyek atau perubahan perilaku masyarakat yang telah dicapai.

9. Peningkatan Partisipasi Perempuan: Indikator ini menekankan pada lebih banyak perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan dan pengambilan keputusan komunitas.
10. Dampak Ekonomi: Indikator ini mencakup peningkatan pendapatan atau keberhasilan dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
11. Kesejahteraan Anak-Anak: Indikator ini mencakup kesejahteraan yang lebih baik dan hak-hak anak-anak di lingkungan yang dilayani.
12. Peningkatan Kepemimpinan Masyarakat: Indikator ini mengukur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kemampuan kepemimpinan.

Pilihan indikator yang tepat harus didasarkan pada tujuan program, kesulitan yang dihadapi, komunitas yang dilayani, dan sumber daya yang tersedia untuk pengukuran. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat dipahami secara lebih lengkap dengan menggabungkan berbagai indikator. Selain itu, indikator-indikator ini harus dapat dilacak secara berkala agar relevan dengan tujuan program dalam jangka panjang, dan dapat diukur.<sup>3</sup>

## B. Zakat Produktif

Dilihat dari segi bahasa, zakat berarti suci, pertumbuhan, peningkatan, dan berkah. Lafaz *tuzakkihim* dalam ayat tersebut berasal dari kata *zakka*, yang berarti menyucikan dan juga bisa berarti mengembangkan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 103, berikut ini.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

---

<sup>3</sup> Andi Hasdiansyah, *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*, CV. Eureka Media Aksara, 2023. 150-152

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Zakat hukumnya wajib, artinya diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain; namun, orang lain dapat membantu melaksanakannya. Zakat terdiri dari dua kategori: zakat *fitrah* dan zakat *mal*.

Zakat *fitrah* ialah zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setiap tahun selama bulan Ramadhan untuk bersuci, membantu orang miskin, dan bersyukur atas puasa bulan Ramadhan telah berakhir. Namun, zakat *mal* adalah kewajiban seorang muslim untuk membayarnya sesuai dengan nisab. Zakat *mal* tidak dibatasi waktunya. Beberapa jenis zakat yang ada di *mal* termasuk zakat perniagaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lain-lain.

Jenis dari zakat masing-masing memiliki ukurannya sendiri. Namun, tidak sama dengan zakat fitrah dan mal dalam hal zakat produktif. Zakat produktif adalah jenis pemberdayaan zakat di mana distribusinya bersifat produktif, yaitu menambah atau menggunakan mustahik sebagai modal usaha. Zakat konsumtif juga hanya istilah yang digunakan untuk menyediakan zakat yang cepat habis.<sup>5</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia, kata "produktif" berasal dari kata Inggris "*productive*", yang berarti "mampu menghasilkan dalam jumlah besar" atau "mampu menghasilkan terus menerus dan menggunakannya untuk membuat komponen baru." Zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada mustahiq yang tidak digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha

---

<sup>4</sup> Kemenang, Al Quran QS At-Taubah/9:103. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>

<sup>5</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020): 136–147.

mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Zakat produktif juga didefinisikan sebagai zakat yang diberikan kepada pihak yang melakukan aktivitas pada usaha masyarakat atau perorangan yang dapat menghasilkan keuntungan (profit), seperti pertanian, peternakan, bisnis pertukaran, atau dagang, dan sebagainya.

Perihal dalam pengembangan, terdapat dua komponen. Pertama adalah aspek spiritual. Mereka yang memberi zakat akan dilipatgandakan pahala oleh Allah karena mereka memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan membantu orang lain yang kurang beruntung. "*Dan yang kamu berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya,*" dari Q.S Al-Rum ayat 39.

Kedua, faktor keuangan. Memberikan harta zakat kepada mustahik juga meningkatkan kemampuan untuk membeli barang-barang murah. Mereka akan memanfaatkan uang zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan harta itu berkembang di kalangan muzakki dan mustahik. Daya beli mustahik dapat menciptakan *ekuilibrium* baru dalam hubungan antara produsen dan konsumen dalam tinjauan ekonomi.

Pemikiran ini baru-baru ini muncul pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif, karena saat ini persediaan harta zakat mereka adalah satu-satunya sumber daya yang dapat mereka beli. Bagaimana melanggengkan ekuitas interaksi tentu saja, pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor yang menghasilkan. Zakat produktif sangat penting, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya, dengan cara pendayagunaan yang produktif. Ini dibutuhkan untuk menghindari orang miskin dari riba dan mendorong ekonomi mereka.

---

<sup>6</sup> Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, 2020: 1-68.

Kenyataannya, zakat produktif seharusnya diberikan secara keseluruhan karena jumlah mustahik di Indonesia masih jauh lebih besar daripada jumlah total. lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat untuk mengumpulkan potensi zakat yang ada. Sebaliknya, sebagian besar orang miskin yang termasuk dalam kelompok usia produktif harus mendapatkan bantuan melalui program pengentasan kemiskinan. Secara teoritis, tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika diberikan secara tamlik kepada para mustahik.

Pendapat berbeda terletak pada tingkat kepemilikan, yaitu sistem mana yang sesuai untuk menerapkannya. Apakah sistem Qardh al-Hasan atau sistem lain, dimana dana hanya dipinjamkan dan para mustahik harus mengembalikannya, baik melalui angsuran atau pembagian keuntungan untuk disalurkan.<sup>7</sup> Salah satu keuntungan dari dana zakat produktif adalah bahwa mereka sangat membantu dalam mendorong modal usaha masyarakat untuk membangun perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif juga dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup.<sup>8</sup>

Zakat produktif juga memiliki beberapa peran dan fungsi, seperti sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan, sebagai modal kerja, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan bisnis, dan memiliki kemampuan untuk menyisihkan uang untuk menabung, dan sebagai stabilisator ekonomi.<sup>9</sup> Sejak lama, ulama juga berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan secara efektif. Menurut Masjfuk Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-

---

<sup>7</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, 2020: 93-138.

<sup>8</sup> Musyifikah Hendrayanto, Sanusi, Nur Taufiq, Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 39-47.

<sup>9</sup> Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3067-3073.

Khatab selalu memberikan zakat kepada fakir miskin, bukan hanya sedikit uang atau makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga sejumlah modal, seperti ternak unta, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.<sup>10</sup> Membayar zakat adalah bentuk ibadah yang bertujuan untuk menghindari kekafiran dan menghilangkan rasa iri dan dengki ketika orang miskin melihat orang kaya.<sup>11</sup>

### C. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu negara diatur oleh sistemnya sesuai dengan kondisi negara tersebut dalam sistem ekonomi.<sup>12</sup> Ekonomi, di sisi lain, adalah bidang yang mempelajari bagaimana tindakan manusia dipengaruhi oleh hubungan antara kebutuhan manusia dan alat yang tersedia, serta jumlah alat yang terbatas yang memungkinkan penggunaan alternatif. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan ekonomi dibuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, kestabilan harga atau inflasi, pengurangan pengangguran, dan distribusi pendapatan yang merata.<sup>13</sup> Ekonomi bukan hanya tentang uang dan keuangan; itu juga membahas semua aspek kehidupan, seperti bagaimana manusia membuat keputusan rasional.<sup>14</sup>

Kesenjangan sosial ekonomi adalah salah satu contoh masalah yang sering muncul dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Berbagai negara mengalami kesenjangan sosial ekonomi, terutama negara yang masih berkembang. Keadaan dimana orang dalam suatu masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia disebabkan oleh kondisi

---

<sup>10</sup> Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 50–72.

<sup>11</sup> Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat."

<sup>12</sup> Royda, *Perekonomian Indonesia* (Penerbit NEM, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=BiYrEAAAQBAJ>: 5-140.

<sup>13</sup> Dr. Agoes Parera, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bumi Aksara, 2021), [https://books.google.co.id/books?id=Bps\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Bps_EAAAQBAJ): 6-15.

<sup>14</sup> B Kurniawan, *Ekonomi Politik Pembangunan* (Pustaka Media, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=itozEAAAQBAJ>: 10-25.

ekonomi yang tidak merata di wilayah tersebut dikenal sebagai kesenjangan sosial ekonomi.<sup>15</sup> Masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah biasanya memiliki perbedaan sosial ekonomi.

Dilihat dari berbagai aspek hal tersebut hampir tidak dapat dihilangkan atau dihindari kecuali diminimalkan sekecil mungkin agar tidak menjadi masalah dan tidak dapat diterima oleh masyarakat umum.<sup>16</sup> Mengatasi masalah ini dapat dicapai melalui program pertumbuhan ekonomi, dimana ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar berarti kesejahteraan ekonomi masyarakat juga lebih baik. Ini dapat dimulai dengan pembagian zakat produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Adam Smith's *The Wealth of Nation* adalah sumber utama teori kesejahteraan, yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya, kesejahteraan akan dicapai saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Beberapa indikator utama dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga, seperti kepemilikan harta benda, rasa aman dalam keluarga, saling mencintai dan menyayangi, aktualisasi kepala keluarga dalam keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor yang dominan yang menentukan kesejahteraan rumah tangga dapat diurutkan berdasarkan besarnya

---

<sup>15</sup> Mega Silpia, "Implementasi Sistem Ekonomi Untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial Perekonomian di Indonesia," *Pusdansi* 2, no. 3 (2022): 1–8.

<sup>16</sup> Nur Azmil Islahiha, Nur Frita, and Reza Maulana, "Penerapan Sistem Perekonomian Syariah dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif* 3, no. 2 (2019): 84–90.

<sup>17</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz: jurnal ekonomi keuangan dan perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136-147.

nilai faktor beban, yaitu kepemilikan harta benda, saling mencintai, aktualisasi keluarga, dan rasa aman dalam keluarga.<sup>18</sup>

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi dan mencapai kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>19</sup> Kesejahteraan bisa dinilai dari segi kesejahteraan keluarga yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi kriteria keluarga sejahtera dalam lima tahapan yakni:

1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu maupun lebih dari lima kebutuhan dasar manusia diantaranya sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan dan belum memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau yang biasa disebut juga dengan indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).
2. Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti beribadah, makan 2 kali sehari, memiliki pakaian berbeda saat sekolah, bekerja, keseharian, rumah memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik, bila sakit sanggup membawa ke sarana kesehatan, bila ingin KB sanggup membayar menggunakan alat kontrasepsi, dan semua anak 7-15 tahun dapat bersekolah. Yang intinya dapat memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator

---

<sup>18</sup> Yulhendri Yulhendri dan Nora Susanti, "Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga," *Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan* 15, no. 2 (2017): 185–202.

<sup>19</sup> Astuti, Sidharta Adyatma, dan Ellyn Normelani, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan," *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 4, no. 2 (2017): 20–34.

Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) yaitu keluarga yang mampu memenuhi kriteria pada keluarga sejahtera I dan ditambah dengan dapat memenuhi syarat sosial psikologi seperti anggota keluarga beribadah secara teratur, paling kurang sekali dalam seminggu dapat makan daging, ikan maupun telur, luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi dalam setiap pengguna rumah, seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja dan memperoleh penghasilan, seluruh keluarga usia 10-60 tahun bisa baca dan tulis, dan pasangan yang subur dengan dua anak atau lebih yang memakai alat atau obat kontrasepsi. Yang intinya dapat memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 Indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator kebutuhan pengembangan (*develomental needs*) dari keluarga.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III (KS III) yaitu keluarga yang dapat memenuhi syarat keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II dengan tambahan keluarga dapat berupaya dalam meningkatkan pengetahuan pada bidang keagamaan. Sebagian penghasilan bekerja anggota keluarga bisa ditabung, memiliki kebiasaan makan bersama serta berkomunikasi, dapat bersosialisasi atau ikutserta dalam masyarakat lingkungannya, dapat memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, maupun radio. Yang memiliki inti dapat memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga.

5. Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan keluarga sejahtera III dengan tambahan keluarga dapat memberikan sumbangan sukarela berupa materil secara teratur dalam kegiatan sosial, dan terdapat anggota keluarga yang menjadi bagian sebagai pengurus yayasan, institusi, dan perkumpulan sosial.<sup>20</sup> Yang memiliki inti dapat memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Berikut ini rincian dari masing-masing indikator keluarga:

1. Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga (*Basic Needs*)
  - a. Makan dua kali sehari atau lebih.
  - b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian.
  - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
  - d. Bila ada anggota keluarga sakit bisa membawa ke sarana kesehatan.
  - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB bisa pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
  - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah (wajib belajar 9 tahun).
2. Indikator Kebutuhan Psikologis (*Psychological Needs*) Keluarga

---

<sup>20</sup> Riczi Bayu Andika Anur Rachman, "Peran Pemberdayaan Perempuan Difabel dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri)," *Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri.*, 2020, <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/2873>.

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
  - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
  - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.
  - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
  - h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
3. Indikator Kebutuhan Pengembangan (*Develomental Needs*) dari Keluarga
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
4. Indikator Aktualisasi Diri (*Self Esteem*) Keluarga
- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.<sup>21</sup>

Definisi Keluarga Sejahtera menurut BKKBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 yakni keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari program dan pelayanan yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan keluarga mengacu pada kesejahteraan dimana semua kebutuhan jasmani dan rohani keluarga dapat dipenuhi dengan tingkat hidup yang layak.<sup>22</sup> Adapun indikator kesejahteraan adalah dapat dilihat pada tingkat kebutuhan ekonomi, keadaan tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, fasilitas tempat tinggal, dan rasa aman dari kejahatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dayaasri.desa.id Diakses Pada 23 Juli 2024 Pukul 06.25. <https://dayaasri.desa.id/artikel/2023/11/13/klasifikasi-keluarga-sejahtera-menurut-bkkbn>

<sup>22</sup> Pardomuan Robinson Sihombing dan Rini Rahani, "Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga Yang Dipimpin Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 2 (2021): 225–232.

<sup>23</sup> Ervine Surya Lesmana, "Peran Zakat Produktif Melalui Program Kambing Bergulir dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahiq di Kota Kediri (Studi Kasus di NU-Care LAZISNU Kota Kediri)," 2023.